

---

## Biormatika :

Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

<http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FKIP/>

---

### Pancasila sebagai Landasan Filosofi Pendidikan Karakter Kurikulum 2013

**Bayu Ananto Wibowo**

Universitas PGRI Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia

bayuananta@upy.ac.id

---

#### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2020

Disetujui Februari 2020

Dipublikasikan Februari  
2020

#### Abstrak

Penerapan Pendidikan Karakter pada kurikulum 2013 adalah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan moral di Indonesia. Terdapat 18 nilai-nilai karakter yang menjadi fokus dalam pendidikan karakter di kurikulum 2013, yang bisa di komparasikan dengan landasan dasar negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Kelima nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila merupakan inti hidup dalam kebudayaan bangsa, sekaligus menjadi tuntutan dan tujuan hidupnya, serta menjadi ukuran dasar seluruh perikehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah moral, moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa. Oleh karena itu sudah seharusnya Pendidikan Karakter pada kurikulum 2013 sesuai dengan falsafah Pancasila.

**Kata Kunci : pancasila, landasan filosofi, pendidikan karakter**

#### Abstract

*The implementation of Character Education in the 2013 curriculum is one of the government's efforts to overcome moral problems in Indonesia. There are 18 character values that are the focus of character education in the 2013 curriculum, which can be comparable with the basic foundations of the Indonesian state. Indonesia is a country based on Pancasila. The five basic values covered by Pancasila are the core of life in the nation's culture, as well as the demands and purposes of life, and become the basic measure of the whole life of the Indonesian nation. In other words, in essence is the moral, moral of the Indonesian*

---

---

*nation that binds all citizens, both as individuals and as a unity of the nation. Therefore it should be Character Education in the curriculum 2013 in accordance with the philosophy of Pancasila.*

***Keywords: pancasila, philosophical foundation, character education***

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia masa kini tengah dilanda krisis karakter, secara factual, data realistik menunjukkan bahwa moralitas maupun karakter bangsa saat ini sedang runtuh. Runtuhnya moralitas dan karakter bangsa tersebut telah mengundang berbagai musibah dan bencana di negeri ini. Musibah dan bencana tersebut meluas pada ranah social-keagamaan, budaya, hukum maupun politik (Suyadi, 2015).

Musibah sosial keagamaan dapat diamati pada hilangnya akhlak melalui westernisasi yang berdampak buruk pada masyarakat Indonesia. Cara berpakaian, pergaulan bebas, penghormatan kepada yang lebih tua, bahkan tingkat kriminalitas tinggi yang akhir-akhir ini tersangka lebih banyak mengarah pada pelajar. Musibah budaya dapat diamati pada masyarakat Indonesia yang lebih senang meniru gaya hidup kebarat-baratan sehingga melupakan dimana mereka berasal.

Musibah hukum maupun politik dapat kita lihat dari peristiwa korupsi dewasa ini yang menyeret ketua DPR, selain itu masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang seakan menjadi “budaya” di negeri Indonesia ini.

Kondisi demikian membuat masyarakat Indonesia melupakan jati dirinya, yaitu manusia yang Pancasilais. Manusia yang paham akan dasar negaranya. Manusia yang mampu mengamalkan setiap sila-silanya. Jika hal ini terus dibiarkan hingga moralitas dan karakter bangsa hilang, maka makna Pancasila hanyalah sebuah teks yang

selalu di ucapkan setiap kali mengikuti upacara bendera.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu upaya yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya adalah melalui pendidikan sebagai upaya untuk memperbaiki moralitas dan karakter bangsa Indonesia. Karena dirasa lebih mudah untuk menanamkan karakter dan membentuknya sejak dini melalui pendidikan. Namun yang dimaksudkan adalah sebuah pendidikan yang sebenarnya, pendidikan yang tidak melupakan jati dirinya, pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang mampu membentuk moral dan karakter bangsa yang kuat, yang sesuai dengan landasan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Penerapan Pendidikan Karakter pada kurikulum 2013 adalah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan karakter bangsa. Ada 18 nilai-nilai karakter yang menjadi fokus dalam pendidikan karakter di kurikulum 2013, yang bisa kita komparasikan dengan Pancasila sebagai landasan dasar negara Indonesia.

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-

2015, dimana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila” (Heri, 2014).

Pancasila adalah etika dan moral bangsa Indonesia dalam arti merupakan inti bersama dari pelbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia yang mampu mengatasi segala paham golongan di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis.

Dalam pengertian inilah maka sila – sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dalam sikap mental dan tingkah laku adalah dasar filsafat hidup, ideologi, dan moral negara yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia.

Pengembangan ini dilakukan salahsatu caranya adalah melalui pendidikan karakter kurikulum 2013. Pendidikan karakter kurikulum 2013 ini akan diterapkan dan diamalkan pada setiap sekolah-sekolah semenjak dini. Sehingga melalui pendidikan Negara dapat mencetak manusia yang cerdas, terampil, serta berkarakter Pancasila.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan study pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3 dalam Supriyadi, 2016:83).

Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh runga dan waktu (Zed, 2003:3 dalam Supriyadi, 2016:83).

Berdasarkan pemapara diatas maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dokumen, serta sumber-sumber informasi pendukung lainnya yang yang relevan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan adalah upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani anak-anak. Selain itu pendidikan digelar untuk memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan masyarakatnya. Dalam pengertian tersebut, pendidikan tidak hanya untuk intelektualitas saja tetapi juga untuk membimbing perkembangan karakternya. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan moral, pengembangan ilmu pengetahuan, dan keterampilan, secara bersama-sama (Diah, 2016).

Untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional di Indonesia maka diperlukan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1989 berbunyi:

*“Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.”*

Dalam penjelasan undang-undang tersebut, dikemukakan bahwa sebutan sistem pendidikan nasional merupakan perluasan dari pengertian sistem pengajaran nasional yang masuk dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, pasal 31 ayat 2. Perluasan ini memungkinkan untuk tidak membatasi pada pengajaran saja, melainkan meluas kepada masalah yang berhubungan dengan pembentukan manusia Indonesia (Soetjipto dan Rafliis, 2011).

Dari beberapa pemahaman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan negara maupun masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, potensi diri, serta membentuk karakter budi pekerti yang baik. Karakter budi pekerti yang baik adalah jawaban untuk memperbaiki moralitas bangsa Indonesia yang sedang turun.

#### **Nilai-nilai Karakter yang termuat dalam Pendidikan Karakter Kurikulum 2013**

Dalam naskah akademik Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah merumuskan lebih banyak nilai-nilai karakter (18 nilai) yang akan dikembangkan atau ditanamkan kepada anak-anak dan generasi muda bangsa Indonesia (Kemendiknas, 2010: 9-10). Nilai-nilai karakter tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Religius; Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama.
- 2) Jujur; Perilaku yang dilaksanakan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- 3) Toleransi; Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- 4) Disiplin; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- 5) Kerja Keras; Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kreatif; Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- 7) Mandiri; Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- 8) Demokratis; Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) Rasa Ingin Tahu; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
- 10) Semangat Kebangsaan; Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- 11) Cinta Tanah Air; Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

- 12) Menghargai Prestasi; Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- 13) Bersahabat/Komunikatif; Tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
- 14) Cinta Damai; Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- 15) Gemar Membaca; Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
- 16) Peduli Lingkungan; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kekrusakan alam yang sudah terjadi
- 17) Peduli social; Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- 18) Tanggung Jawab; Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri.

#### **Makna Sila-sila dari Pancasila**

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila – sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan (Syahrul, 2011).

Pancasila mempunyai pengertian secara umum sebagai pandangan dunia (*way of life*), pandangan hidup (*weltanschauung*), pegangan hidup (*welddbeschauung*), petunjuk hidup (*werelden levens beschouwing*) yang dapat menjadi pedoman bangsa. Dalam hal ini, Pancasila diperuntukkan sebagai petunjuk hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila diperuntukkan sebagai petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang : politik, pendidikan, agama, budaya, sosial dan ekonomi. Ini berarti semua tingkah laku dan tindak tanduk perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila (Kaelan, 1993:18).

Secara etimologis, menurut tingkatnya, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, India (bahasa kasta Brahmana). Menurut Prof. Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan ”Pancasila” ada dua macam arti, yaitu: Panca artinya ‘lima’, sedangkan, syiila berkaitan dengan peraturan tingkah laku yang penting/ baik. Dengan demikian, Pancasila itu memiliki prinsip-prinsip moral dan etika (Kaelan, 1993:18).

Isi dari Pancasila adalah sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama ini meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila pertama ini kita harus percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila kedua, pada dasarnya meliputi

dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kedua, kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Persatuan Indonesia, sila ketiga ini diliputi dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ketiga ini kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila keempat, berarti berarti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Di dalam sila kelima berarti perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social (Kaelan, 1993:18).

Bagi Indonesia, pandangan hidup masyarakatnya yang kemudian menjadi pandangan hidup bangsa adalah Pancasila. Pancasila itu dibahas, dirumuskan, disepakati oleh para pendiri negara (*founding father*) dalam rangka membentuk sebuah negara nasional, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan pandangan hidup bangsa yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenali dan memecahkan masalah politik, ekonomi social budaya, hukum dan pertahanan-keamanan yang timbul dalam gerak dan dinamika masyarakat yang makin maju dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula, suatu bangsa akan membangun dirinya (Pariata. 1995).

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut secara lahiriah merupakan hasil mufakat para anggota BPUPKI maupun anggota PPPKI dan memiliki makna di setiap silanya. Seperti yang tertera pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Pariata. 1995) sebagai berikut:

Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara baik yang bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara baik yang material maupun yang spriritual harus sesuai dengan nilai-nilai pancasia.

Dalam kaitannya dengan sila pertama, pernyataan ini mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk Tuhan dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk manusia adalah berasal dari Tuhan.

Sedangkan kaitannya dengan negara, antara negara dengan manusia mempunyai hubungan yang bersifat langsung karena negara pada hakikatnya suatu lembaga kemanusiaan dan lembaga kemasyarakatan yang anggotanya terdiri atas manusia.

Hubungan negara dengan Tuhan bersifat tidak langsung, negara memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung dengan manusia sebagai pendukungnya; sedangkan manusia mempunyai hubungan sebab-akibat yang langsung dengan Tuhannya.

Atas dasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sila pertama mengandung makna bahwa negara dengan segala aspek pelaksanaannya harus sesuai dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa karena negara memiliki hubungan sebab-akibat yang tidak langsung dengan Tuhan lewat manusia.

Sila kedua; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Manusia sebagai makhluk Tuhan sejak lahir merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Ia memiliki akal budi dan kehendak yang pada awalnya merupakan suatu potensi yang harus berkembang untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya.

Untuk mencapai perkembangan pribadinya, manusia yang wajar tidak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri melainkan memerlukan manusia lain dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa manusia harus saling membantu dan saling melengkapi. Oleh sebab itu

manusia wajib dan berhak untuk hidup secara merdeka.

Sila kedua mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Isi arti sila kedua ini dijiwai dan didasari oleh sila pertama, dan mendasari sila ketiga (Persatuan Indonesia). Sebenarnya sila kedua ini senantiasa terkandung didalam keempat sila yang lainnya. Maknanya adalah kemanusiaan yang adli dan beradab yang berketuhanan Yang Maha Esa , berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kedua sila pancasila ini mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang bersumber pada hakikatnya manusia.

Sila ketiga; Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, demikian sila persatuan Indonesia ini menjiwai sila-sila berikutnya. Dengan demikian sila persatuan Indonesia ini adalah persatuan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, peranan persatuan Indonesia memegang kunci pokok demi terwujudnya tujuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu pengertian persatuan Indonesia ini bukan sekedar pengertian yang sifatnya statis, yaitu persatuan sebagai hasil dalam wujud persatuan wilayah, bangsa dan susunan negara, namun juga bersifat dinamis yaitu harus senantiasa dipelihara, dipupuk dan dikembangkan.

Jadi makna Persatuan Indonesia adalah sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Sifat Indonesia yang sesuai dengan hakikat satu berarti mutlak dan tidak dapat dibagi, sehingga bangsa Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu merupakan suatu negara yang berdiri sendiri memiliki sifat

dan keadaannya sendiri yang terpisah dari negara lain di dunia ini. Sehingga Indonesia merupakan suatu diri pribadi yang memiliki ciri khas, sifat dan karakter sendiri yang berarti memiliki suatu kesatuan dan tidak terbagi-bagi.

Sila keempat; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila ini merupakan suatu frase yang utuh. Disamping “Kerakyatan” yang merupakan inti arti sila keempat, terangkai pula kata kerja “yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. “Hikmat Kebijaksanaan” ini berarti kearifan yang bersumber dari wahyu Tuhan, kearifan yang dilandasi budi luhur yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sekaligus kepada kemanusiaan. Dengan sendirinya kesahihan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan berarti juga dapat dipertanggungjawabkan bagi kepentingan masyarakat dan bangsa, karena masyarakat adalah kumpulan manusia. Sedangkan Tuhan adalah alasan dari keberadaan manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu kerakyatan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan asas hidup kerohanian yaitu kemanusiaan, karena manusia adalah sebagai pendukung pokok negara.

Sila Kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima dari Pancasila ini merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila yang lainnya. Sila kelima ini didasari dan dijiwai dari sila-sila yang mendahuluinya. Karena Pancasila senantiasa merupakan suatu kesatuan, maka sila kelima dengan sila-sila lainnya saling melengkapi. Jika di ikhtisarkan menjadi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, dan berkerakyatan. Oleh karena itu sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila lainnya.

Secara filosofis hakikat makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat adil. Seluruh system serta keadaan dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat adil. Keadilan merupakan suatu tujuan dari suatu lembaga kemanusiaan dan lembaga kemasyarakatan yang disebut negara. Oleh karena itu keadilan sosial adalah tujuan dari lembaga kemasyarakatan dari manusia-manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama) dan sebagai manusia yang adli dan beradab (sila kedua), yang hidup dalam suatu negara persatuan (sila ketiga) yang mendasar pada kerakyatan (sila keempat) demi terwujudnya suatu keadilan (sila kelima) dalam hidup bersama.

### **Pancasila sebagai Landasan Filosofi Pendidikan Karakter Kurikulum 2013**

Pendidikan karakter kurikulum 2013 sebelum di implementasikan harus disepakati dahulu secara nasional apa yang menjadi dasar filosofinya. Jika mengakar pada kesepakatan para founding fathers saat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dasar filosofinya adalah pancasila (Muchlas dan Hariyanto. 2017).

Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila maknanya adalah setiap aspek karakter harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif sebagai berikut :

1. Sila pertama; Bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Merupakan bentuk kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Dalam hubungan antar-manusia, karakter ini dicerminkan antara lain dengan saling menghormati, bekerja sama, dan berkebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.



2. Sila kedua; Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang adil dan beradab

Diwujudkan dalam perilaku hormat menghormati antar warga dalam masyarakat sehingga timbul suasana kewargan (*civic*) yang saling bertanggung jawab, juga adanya saling hormat menghormati antar warga bangsa. Karakter kemanusiaan tercermin dalam pengakuan atas kesamaan derajat, hak dan kewajiban, saling mengasihi, tenggang rasa, peduli, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan.

3. Sila ketiga; Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa

Memiliki komitmen dan perilaku yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Karakter kebangsaan seseorang akan tercermin dalam sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

4. Sila keempat; Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia

Bangsa ini merupakan bangsa yang demokratis yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang senantiasa dilandasi nilai dan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Sila kelima; Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan

Memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan seluruh bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan social tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan dan

kegotongroyongan, menjaga harmonisasi antar hak dan kewajiban.

Pada kelima sila Pancasila tersebut sudah tertanam karakter bangsa Indonesia. Karena pada hakikatnya pancasila merupakan kepribadian Indonesia. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah dimasa lampau, tentang perjuangan dan cita-cita hidup dimasa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri.

Pancasila merupakan landasan filosofi Pendidikan karakter kurikulum 2013. Hal ini dapat di analisis keterkaitannya antara kelima sila dari Pancasila dengan 18 nilai karakter yang terdapat dalam pendidikan karakter kurikulum 2013 sebagai berikut:

1. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pendidikan karakter memiliki nilai Religius dan toleransi sebagai mana negara Indonesia yang merupakan negara beragama dan negara majemuk, multikultural.

2. Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Dalam Pendidikan karakter memiliki nilai jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, dan gemar membaca. Hal ini sesuai dengan adab dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai manusia.

3. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”.

Dalam pendidikan karakter memiliki nilai cinta tanah air, dan cinta damai.

4. Sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Dalam Pendidikan Karakter memiliki nilai demokratis, komunikatif, dan semangat kebangsaan dimana menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

5. Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dalam pendidikan karakter memiliki nilai peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab dimana mencerminkan sifat negara Indonesia yang berkeadilan sosial. Dengan demikian kedelapan belas nilai karakter yang dicanangkan Kemendiknas dalam upaya membangun karakter bangsa melalui sekolah adalah berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofinya.

### **KESIMPULAN**

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah lama berakar serta hidup dalam hati nurani, sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang tercermin dalam adat-istiadat, kebiasaan, perilaku serta lembaga-lembaga masyarakat. Kelima nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila merupakan inti hidup dalam kebudayaan bangsa, sekaligus menjadi tuntutan dan tujuan hidupnya, serta menjadi ukuran dasar seluruh perikehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pada hakikatnya adalah moral, moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa.

Pancasila adalah etika dan moral bangsa Indonesia dalam arti merupakan inti bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia. Pancasila adalah lima asas moral yang relevan untuk ditetapkan menjadi dasar negara. Karena itu, nilai-nilai Pancasila juga memiliki nilai-nilai karakter kebangsaan yang menjadi landasan filosofi diterapkannya pendidikan karakter pada kurikulum 2013 itu harus mampu dijadikan landasan dasar dalam upaya mengatasi persoalan karakter bangsa Indonesia saat ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

Gunawan, Heri. 2014. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*.

Bandung: Alfabeta *Language, Literature, and Teaching*, 2(1), 12.

Kaelan. 1993. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta

Kirom, Syahrul. 2011. *Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan*. Jurnal Filsafat Vol.21, Nomor 2, Agustus 2011

Kumalasari, Dyah. 2016. *Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya*. Yogyakarta: Graha Cendekia

Muchlas Samani dan Hariyanto. 2017. *Konsep dan Model pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soetjipto dan Rafli. 2011. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta

Suyadi. 2015. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Supriyadi. 2016. *Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*. Lentera Pustaka 2 (2): 83-93

Westra, Pariata. 1995. *Ensiklopedia: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi dan Manajemen